

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

##### **1. Sejarah Jakarta**

Sekitar 500 tahun silam atau tepatnya pada abad ke-14 Masehi, Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung dan dikenal dengan wilayah Sunda Kelapa dan merupakan suatu wilayah yang berada dalam kekuasaan Kerajaan Padjajaran. Kemudian dalam kurun waktu yang berabad-abad kota ini memiliki perkembangan yang pesat sehingga mampu berubah menjadi pusat dari perdagangan internasional.

Berdasarkan pada laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan terdapat sebuah kota yang disebut dengan Kalapa, yang merupakan bandar utama bagi sebuah kerajaan Sunda dengan Pajajaran sebagai ibukotanya yang berada sekitar 40 kilometer di suatu pedalaman dekat Kota Bogor yang dikenal sekarang. Rombongan besar dari orang-orang Eropa yang pertama kali datang ke bandar Kalapa adalah bangsa Portugis.

Singkat cerita bahwa kota ini diserang oleh seseorang yang masih muda yaitu Fatahillah dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa yang kemudian pada 22 Juni 1527 mengubah Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Tanggal tersebut kemudian pada saat ini diperingati sebagai hari lahirnya Kota Jakarta.

Pada akhir abad ke-16, datanglah orang-orang dari Belanda hingga kemudian menguasai Jayakarta. Jayakarta kemudian mengalami pergantian nama menjadi Batavia dengan alasan bahwa kondisi alam yang memiliki rawa-rawa mirip

seperti di Belanda. Dalam rangka melindungi Kota Batavia dari ancaman banjir, Belanda akhirnya membangun sejumlah kanal. Pusat dari kegiatan-kegiatan pemerintahan kota berada di sekitar lapangan yang berada sekitar 500 meter dari Bandar dengan dibangunnya sebuah balai kota.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan Kota Batavia akhirnya bergeser ke arah selatan. Perkembangan yang pesat tersebut berdampak pada kondisi lingkungan yang dengan cepat mengalami kerusakan, hal tersebut membuat Pemerintah Belanda memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah yang disebut Weltevreden yaitu sebuah lokasi yang berada dalam wilayah yang lebih tinggi dari sebelumnya. ([www.adangdaradjatun.com/berita/nusantara/660-jakarta-dulu-dan-kini?format=pdf](http://www.adangdaradjatun.com/berita/nusantara/660-jakarta-dulu-dan-kini?format=pdf), diakses 3 Maret 2018, pukul 08.29 WIB).

Masuknya penjajahan Jepang sebagai dampak dari kemenangan Jepang di Perang Pasifik membuat Batavia pada tanggal 5 Maret 1942 akhirnya berhasil jatuh dan dikuasai oleh Jepang sekaligus mengakhiri kekuasaan Belanda di Batavia yang menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Untuk menarik hati penduduk pada masa Perang Dunia II, akhirnya nama kota diganti dengan sebutan Jakaruta Tokubetsu Shi.

Untuk mengatur pemerintahan yang ada di Pulau Jawa untuk dibagi menjadi beberapa satuan-satuan daerah, penjajah Jepang kemudian menerbitkan UU Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang membagi beberapa satuan daerah dengan sebutan Pemerintahan Syuu (Karesidenan), yang kemudian dibagi lagi kedalam beberapa Ken (Kabupaten), dan Shi (Kota). Kemudian, pada masa pemerintahan Jepang tersebut Jakarta merupakan

Tokubetshu Shi atau merupakan pemerintahan kota khusus yang satu-satunya berada di Indonesia.

Pada awal masa kemerdekaan, Jakarta sempat dikuasai kembali oleh Belanda yang memiliki keinginan untuk menjajah kembali Indonesia dengan adanya Agresi Militer Belanda. Kondisi tersebut membuat posisi Ibukota Negara sempat dipindahkan ke Yogyakarta. Hingga pada akhir tahun 1949 melalui perundingan di Den Haag yang salah satu hasilnya adalah adanya pengakuan kedaulatan, maka terbitlah Keppres Nomor 25 Tahun 1950, yang mengembalikan Ibukota Negara kembali ke Jakarta dan menetapkan kedudukan Kota Djakarta sebagai suatu daerah Swatantra dengan sebutan “Kotaprdja Djakarta Raya” dimana Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960) merupakan walikota-walikotanya.

Pada masa Gubernur Soemarno, tepatnya tanggal 15 Januari 1960, muncul Undnag-undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya yang pada akhirnya membuat peningkatan status Kota Djakarta menjadi Daerah Tingkat I (DT I) dengan kepala daerah berpangkat Gubernur dan nama pemerintahannya yang disebut dengan Pemerintah DCI Djakarta Raya. Kemudian pada saat Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) menjabat, muncul UU Nomor 9 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sehingga, nama pemerintah kembali berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Pada masa Gubernur Ali Sadikin (1966-1977) Pemerintah DCI Djakarta kemudian berubah nama menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta. Kemudian

pada masa Gubernur Wiyogo Atmodarminto (1987-1992) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990, sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengalami perubahan menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan masa Gubernur Surjadi Soedirja (1992-1997).

Pada tahun 1999, atau tepatnya pada masa Gubernur Sutiyoso (1997-2007), lahir UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Semenjak saat itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan nama resmi dari pemerintahan di Jakarta. Hingga di akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso, terbit UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UU tersebut masih berlaku dengan sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah sama sekali (RKPD DKI Jakarta Tahun 2018).

## **2. Visi Dan Misi Provinsi DKI Jakarta**

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2005-2025 adalah sebagai berikut:

**“Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman,  
Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing  
Global.”**

Ada 6 (enam) misi untuk mengimpelentasikan visi tersebut, yaitu sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana

Wilayah;

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas;

Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya;

Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; dan

Misi 6 : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

Dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki visi pembangunan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari RPJPD DKI Jakarta dengan dijabarkan melalui visi dan misi Tahun 2018-2023 sebagai berikut ([jakarta.go.id](http://jakarta.go.id) , diakses pada 3 Maret 2018, pukul 09.22 WIB)

**Visi:**

“Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan semua.”

**Misi:**

- 1) Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;

- 2) Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
- 3) Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas;
- 4) Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
- 5) Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

### **3. Otonomi Khusus DKI Jakarta**

Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu daerah khusus yang memiliki fungsi sebagai Ibukota NKRI dan sekaligus merupakan suatu daerah otonom di tingkat provinsi. Hal tersebut didasarkan pada UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menuruti dan mengikuti terhadap beberapa asas yaitu asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota NKRI. Kondisi tersebut dilakukan mengingat dengan otonomi Provinsi DKI Jakarta yang diletakkan pada tingkat provinsi.

Berdasarkan pasal 5 UU 27 Tahun 2007, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Konsekuensi dari peran tersebut yaitu di dalam hal perencanaan pembangunan, DKI Jakarta memiliki suatu metode pendekatan tersendiri sehingga memiliki perbedaan dengan provinsi-provinsi lain. Pemerintah Kota dan Kabupaten hanya bersifat sebagai kota administrasi yang kemudian terbagi dalam 5 (lima) wilayah Kota Administratif dan 1 (satu) Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang bukan merupakan daerah otonom. Keberadaan DPRD pada tingkatan Kota maupun Kabupaten tidak ada dan hanya ada DPRD pada tingkat provinsi saja.

Jakarta juga sebagai Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selain berperan sebagai Ibukota NKRI, juga memiliki peran lain yang bersifat multifungsi. Jika melihat perannya dalam perekonomian, Jakarta adalah kota yang menyumbangkan kontribusi paling tinggi terhadap perekonomian nasional dengan angka sekitar 17% dari total PDB nasional. Jakarta juga merupakan pusat dari kegiatan keuangan nasional serta merupakan pusat dari kegiatan pemerintahan yang merupakan suatu tempat kedudukan dari perwakilan-perwakilan negara asing, serta pusat atau perwakilan dari lembaga-lembaga internasional. Maka dari itu, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan untuk aspek luar negeri, Jakarta memiliki peran yang sangat penting bagi NKRI.

Pemprov DKI Jakarta tetap mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian aturan tersebut sudahdirubah beberapa kali

hingga perubahan terakhir adalah dengan munculnya UU Nomor 9 Tahun 2015 yang pada dasarnya aturan tersebut memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Selanjutnya UU tersebut diterjemahkan melalui Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (RKPD DKI Jakarta Tahun 2018).

#### **4. Kondisi Geografis**

Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta berada di sebelah utara dari Pulau Jawa, di muara Sungai Ciliwung. Berdasarkan posisinya, Provinsi DKI Jakarta terletak di sisi barat Indonesia dengan posisi geografis berada di antara 106.22'42" dan 106.58'18" Bujur Timur, serta antara 5.19'12" dan 6.23'54" Lintang Selatan dengan keseluruhan luas wilayah 7.659,02 km<sup>2</sup>, meliputi 662,33 km<sup>2</sup> daratan, termasuk 110 pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan 6.977,5 km<sup>2</sup> lautan. Posisi Jakarta yang berada di dekat dengan garis Khatulistiwa membuat Jakarta memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata yaitu sebesar 27° C.

Jakarta berada pada wilayah dataran rendah dengan rerata ketinggian berkisar 8 mdpl. Kota Jakarta termasuk dalam kategori kota delta (*delta city*) yang merupakan suatu kota yang berlokasi di muara sungai. Secara umum, kota delta berada di bawah permukaan laut, dan memiliki potensi perubahan iklim yang cukup rentan. Kondisi tersebut membuat Jakarta secara geografis rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. DKI Jakarta dilalui oleh sekitar 13 aliran sungai dan dipengaruhi oleh air pasang surut. Tiga belas sungai yang melewati Jakarta sebagian besar berhulu di daerah Jawa Barat dan bermuara di Teluk Jakarta. Tiga

belas sungai tersebut yaitu Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter Kali Cakung, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru Timur, dan Kali Pesanggrahan. Dengan kondisi tersebut beserta dampaknya, Pemprov membangun 2 (dua) buah kanal dengan ukuran besar yaitu Kanal Banjir Timur yang memotong Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, dan Kanal Banjir Barat yang memotong Kali Ciliwung dan Kali Sunter dan Kali Cipinang. Kedua kanal tersebut dibangun sebagai sebuah sarana untuk mengendalikan banjir di Jakarta.

## **5. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Provinsi DKI Jakarta memiliki luas secara keseluruhan sebesar 7.639,83 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan sebesar 662,33 km<sup>2</sup> , luas tersebut sudah termasuk dari 110 pulau yang berada tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, sementara luas lautan Jakarta sebesar 6.977,5 km<sup>2</sup>. Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam 5 (lima) Kota Administrasi dan 1(satu) Kabupaten Administrasi, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas wilayah sebesar 48,13 km<sup>2</sup>; Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas wilayah sebesar 146,66 km<sup>2</sup>; Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas wilayah sebesar 129,54 km<sup>2</sup>; Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas wilayah sebesar 141,27 km<sup>2</sup>; dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas wilayah sebesar 188,03 km<sup>2</sup>, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas wilayah sebesar 8,70 km<sup>2</sup>.

Selain itu, Provinsi DKI Jakarta memiliki wilayah pesisir yang cukup luas, yaitu sekitar 155 km<sup>2</sup>. Wilayah pesisir ini membentang dari mulai ujung timur

sampai ujung barat sepanjang sekitar 35 km, dan menjorok ke arah darat antara 4 - 10 kilometer. Wilayah pesisir Jakarta pada dasarnya merupakan pantai yang beriklim panas dengan suhu rata-rata mencapai 28,5° C, sementara kelembabannya rata-rata sekitar 72 %. Selain merupakan suatu wilayah pesisir, Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai pulau-pulau kecil yang berada di wilayah Kepulauan Seribu. Pulau-pulau yang ada di wilayah ini memiliki luas yang cukup beragam, pulau yang berukuran kurang dari 5 hektar terdapat sekitar 45%, kemudian pulau yang luasnya antara 5-10 hektar sekitar 20%, dan hanya sekitar 30% saja pulau yang memiliki luas lebih dari 10 hektar.

Bagian utara Provinsi DKI Jakarta terdapat pantai yang membentang sepanjang 35 km dan merupakan tempat bermuaranya dari 13 sungai, 2 kanal, dan 2 *flood way*. Sebagian besar karakteristik wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut pasang sehingga menyebabkan sebagian dari wilayah di Provinsi DKI Jakarta rawan terhadap genangan, baik diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi maupun diakibatkan dari semakin tingginya air rob.

Secara administrasi kewilayahan, setiap Kota dan Kabupaten Administratif dibagi ke dalam beberapa kecamatan yang kemudia kecamatan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kelurahan. Untuk lebih jelas, berikut adalah tabel jumlah kecamatan, kelurahan, dan RW/RT yang berada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta:

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pembagian Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota Administrasi	Jumlah		
		Kecamatan	Kelurahan	RW / RT
1.	Jakarta Pusat	8	44	390 / 4.577
2.	Jakarta Utara	6	31	448 / 5.181
3.	Jakarta Barat	8	56	584 / 6.467
4.	Jakarta Selatan	10	65	576 / 6.081
5.	Jakarta Timur	10	65	705 / 7.904
6.	Kepulauan Seribu	2	6	25 / 127

*Sumber : RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018*

Adapun nama- nama wilayah kecamatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

**Kota Jakarta Pusat**

Kecamatan : Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, dan Johar Baru.

**Kota Jakarta Barat**

Kecamatan: Cengkareng, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Kebon Jeruk, Kalideres, Pal Merah, dan Kembangan.

**Kota Jakarta Utara**

Kecamatan : Penjaringan, Tanjung Priuk, Koja, Cilincing, Pademangan, dan Kelapa Gading.

### **Kota Jakarta Timur**

Kecamatan : Matraman, Pulogadung, Jatinegara, Kramat Jati, Pasar Rebo, Cakung, Duren Sawit, Makassar, Ciracas, dan Cipayung

### **Kota Jakarta Selatan**

Kecamatan : Tebet, Setiabudi, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Cilandak, Kebayoran Baru, Pancoran, Jagakarsa, dan Pesanggrahan.

### **Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**

Kecamatan : Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan

Batas-batas wilayah di DKI Jakarta ditentukan oleh UU No. 29 Tahun 2007 dengan batas-batas wilayahnya yaitu bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian di bagian selatan berbatasan langsung dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan di bagian barat dengan langsung dengan Kabupaten dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

**Gambar 2.1**

**Peta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**



*Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta\\_Jakarta.gif](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Jakarta.gif)*

## **6. Demografi**

Pada tahun 2015, jumlah dari penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.177.924 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 5.115.357 jiwa atau sekitar 50,25% dari total penduduk dan jumlah penduduk perempuan yang berjumlah 5.062.567 jiwa atau sekitar 49,74% atau lebih rendah 0,51% dari jumlah penduduk laki-laki. Dengan kondisi tersebut, membuat sex ratio di DKI Jakarta berada pada angka 101,4 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Kondisi

pertumbuhan penduduk tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti oleh kelahiran, kematian, dan migrasi.

## **7. Gambaran Kondisi Politik DKI Jakarta**

### **7.1. Partai-partai di DPRD DKI Jakarta**

Provinsi DKI Jakarta berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, memiliki sistem perwakilan yang khusus dan berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari lembaga perwakilan yang pada umumnya terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tingkat kabupaten/kota, namun khusus untuk DKI Jakarta tidak terdapat DPRD tingkat kabupaten/kota, yang ada hanyalah DPRD untuk tingkat provinsi. Sehingga dengan demikian, ketika pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, rakyat DKI Jakarta hanya memilih calon anggota DPRD Provinsi, DPR-RI, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

UU Nomor 29 Tahun 2007 mengatur mengenai jumlah keanggotaan DPRD DKI Jakarta, dimana berdasarkan UU tersebut perhitungan jumlah keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta ditetapkan paling banyak sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk, oleh karena itu, pada Pemilu 2014 telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 103/Kpts/KPU/Tahun 2013 jumlah perwakilan kursi untuk DPRD DKI Jakarta sebanyak 106 kursi dan memiliki 10 Daerah Pemilihan (Dapil) dengan pembagian Dapil sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pembagian Daerah Pemilihan Anggota DPRD DKI Jakarta 2014-2019**

<b>No</b>	<b>Daerah Pemilihan</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah Kursi Perwakilan</b>
1.	DKI Jakarta 1 (Jakarta Pusat)	Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Cempaka Putih, Johar Baru, Senen, Menteng, dan Tanah Abang	1.049.000	12
2.	DKI Jakarta 2 (Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara - A)	Kepulauan Seribu, Koja, Cilincing, dan Kelapa Gading	794.562	9
3.	DKI Jakarta 3 (Jakarta Utara -B)	Penjaringan, Tanjung Priok, dan Pademangan	816.234	9
4.	DKI Jakarta 4 (Jakarta Timur -A)	Matraman, Pulo Gadung, dan Cakung	911.175	10
5.	DKI Jakarta 5 (Jakarta Timur -B)	Jatinegara, Kramatjati, dan Duren Sawit	938.610	10
6.	DKI Jakarta 6 (Jakarta Timur -C)	Pasar Rebo, Makassar, Ciracas, dan Cipayung	872.211	10
7.	DKI Jakarta 7 (Jakarta Selatan -A)	Setiabudi, Kebayoran Lama, Cilindak, Kebayoran Baru, dan Pesanggrahan	948.470	10
8.	DKI Jakarta 8 (Jakarta Selatan - B)	Tebet, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pancaoran, dan Jagakarsa	1.078.919	12
9.	DKI Jakarta 9 (Jakarta Barat - A)	Cengkareng, Tambora, dan Kalideres	1.060.021	12

10.	DKI Jakarta 10 (Jakarta Barat - B)	Grogol Petamburan, Taman Sari, Kebon Jeruk, Pal Merah, dan Kembangan	1.111.196	12
<b>Jumlah</b>			9.603.417	106

Sumber : <https://pemilu2014.kpu.go.id>

Berdasarkan hasil dari Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan pada tahun 2014, terdapat dari 12 partai politik yang mengikuti Pemilu untuk merebutkan kursi DPRD DKI Jakarta. Pada akhirnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta menetapkan setidaknya terdapat 10 partai politik yang berhasil memiliki kursi perwakilan di DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 yang kemudian tersusun atas 9 fraksi partai politik dimana Partai Demokrat dan PAN bergabung menjadi satu fraksi (<http://dprd-dkijakartaprov.go.id/fraksi/jumlah-kursi-fraksi-dprd-dki-jakarta-periode-2014-2019/> diakses pada 27 Maret 2018 pukul 20.32 WIB).

Adapun jumlah perolehan kursi yang didapatkan oleh partai-partai politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 untuk kursi DPRD DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perolehan Suara Pileg dan Perolehan Kursi**  
**DPRD DKI Jakarta 2014-2019**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Presentase Suara	Jumlah Perolehan Kursi	Presentase Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1.231.843	27,15 %	28	26,42 %

2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	592.558	13,05 %	15	14,15 %
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	424.400	9,35 %	11	10,38 %
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	452.224	9,97 %	10	9,43 %
5.	Partai Demokrat	360.929	7,95 %	10	9,43 %
6.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	357.006	7,87 %	10	9,43 %
7.	Partai Golongan Karya (Golkar)	376.221	8,29 %	9	8,49 %
8.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	260.159	5,73 %	6	5,66 %
9.	Partai NasDem	206.117	4,54 %	5	4,72 %
10.	Partai Amanat Nasional (PAN)	172.784	3,81 %	2	1,89 %
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)	60.759	1,54 %	0	0 %
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	42.217	0,93 %	0	0 %
<b>Jumlah</b>		<b>4.537.227</b>	<b>100 %</b>	<b>106</b>	<b>100 %</b>

*Diolah dari berbagai sumber*

Sementara itu, secara struktural terdapat 5 (lima) orang pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Ketua DPRD : H. Prasetio Edi Marsudi, S.H (PDI-P)

Wakil Ketua DPRD : H. Mohamad Taufik (Partai Gerindra)

Wakil Ketua DPRD : Ir. H. Triwisaksana, M. Sc (PKS)

Wakil Ketua DPRD : H. Lulung A L, SH (PPP)

Wakil Ketua DPRD : Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan (Demokrat)

## 7.2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) DKI Jakarta

Setelah melalui berbagai pembahasan dan rekapitulasi dari 6 (enam) kabupaten/kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Penetapan tersebut dilaksanakan pada 6 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Data Pemilih Tetap Pilkada Serentak 2017**  
**Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017**  
**Putaran Pertama**

No	Kab/ Kota	Total TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih Pemula			Jumlah Pemilih Difabel					
			Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total (%)	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Lain nya	Total (%)
1.	Jakarta Barat	2.934	834.448	817.603	<b>1.652.051</b>	22.659	21.724	44.383 (2,69)	500	190	227	729	457	2.103 (0,13)
2.	Jakarta Pusat	1.237	374.307	372.845	<b>747.152</b>	11.460	10.588	<b>22.048</b> (2,95)	108	70	79	101	224	582 (0,08)
3.	Jakarta Selatan	2.973	796.540	797.160	<b>1.593.700</b>	21.879	21.275	43.154 (2,71)	331	119	105	135	200	890 (0,06)
4.	Jakarta Timur	3.690	999.941	1.006.456	<b>2.006.397</b>	29.699	28.336	58.035 (2,89)	400	172	215	371	276	1.434 (0,07)
5.	Jakarta Utara	2.150	547.668	544.206	<b>1.091.874</b>	16.105	15.485	<b>31.590</b> (2,89)	152	31	43	40	60	326 (0,03)
6.	Kep. Seribu	39	8.786	8.629	<b>17.415</b>	326	304	630 (3,62)	18	5	4	2	7	36 (0,21)
<b>Total</b>		<b>13.023</b>	<b>3.561.690</b>	<b>3.546.899</b>	<b>7.108.589</b>	<b>102.128</b>	<b>97.712</b>	<b>199.840</b> (2,81)	<b>1.509</b>	<b>587</b>	<b>673</b>	<b>1.378</b>	<b>1.224</b>	<b>5.371</b> (0,08)

Sumber : <https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/1/DKI%20JAKARTA>

Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta berlangsung dengan dua putaran, hal tersebut terjadi mengingat pada saat pelaksanaan Pilkada di putaran pertama tidak ada satu pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Maka, untuk mendukung pelaksanaan putaran kedua tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) DKI Jakarta telah memperbarui dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua pada tanggal 6 April 2017 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Data Pemilih Tetap Pilkada Serentak 2017**  
**Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017**  
**Putaran Kedua**

No	Kab/ Kota	Total TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih Pemula			Jumlah Pemilih Difabel					
			Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total (%)	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Lain nya	Total (%)
1.	Jakarta Barat	2.935	848.124	833.374	1.681.498	2.487	2.381	4.868 (0,29)	482	186	224	508	441	1.841 (0,11)
2.	Jakarta Pusat	1.238	378.648	378.867	757.515	1.561	1.494	3.055 (0,4)	107	71	79	100	201	588 (0,07)
3.	Jakarta Selatan	2.974	801.668	805.253	1.606.921	2.509	2.207	4.716 (0,29)	310	111	105	131	196	853 (0,05)
4.	Jakarta Timur	3.698	1.007.452	1.017.705	2.025.157	2.831	2.518	5.349 (0,26)	430	174	209	356	272	1.441 (0,07)
5.	Jakarta Utara	2.150	565.244	564.250	1.129.494	1.794	1.748	3.542 (0,31)	144	31	40	38	53	306 (0,03)
6.	Kep. Seribu	39	8.943	8.752	17.695	38	55	93 (0,53)	15	5	4	2	4	30 (0,17)
<b>Total</b>		<b>13.034</b>	<b>3.610.079</b>	<b>3.608.201</b>	<b>7.218.280</b>	<b>11.220</b>	<b>10.403</b>	<b>21.623 (0,30)</b>	<b>1.488</b>	<b>578</b>	<b>661</b>	<b>1.135</b>	<b>1.167</b>	<b>5029 (0,07)</b>

Sumber : <https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/2/DKI%20JAKARTA>

### 7.3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017

Semenjak proses Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat mulai diberlakukan pertama kali di tahun 2005, tercatat Provinsi DKI Jakarta

sudah melaksanakan 3 (tiga) kali pelaksanaan Pilkada langsung. Diantaranya yaitu Pilkada langsung DKI Jakarta yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007 yang dimenangkan oleh pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto, kemudian tahun 2012 yang dimenangkan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, serta yang terbaru adalah Pilkada Serentak 2017 yang dimenangkan oleh Anies-Sandi.

Pilkada serentak tahun 2017 dilaksanakan bersamaan dengan 101 daerah lainnya yang terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota di seluruh Indonesia termasuk Provinsi DKI Jakarta (<https://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017> diakses pada 29 Maret 2018 pukul 16.35 WIB). Berdasarkan pengumuman dari KPU DKI Jakarta Nomor 489/KPUProv-010/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, diantaranya adalah :

- 1) Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A, M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si (Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional) dengan dukungan kursi DPRD sebesar 28 kursi;
- 2) Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. Djarot Syaiful Hidayat, MS. (PDI-Perjuangan, Partai Hanura, Partai Golongan Karya, dan Partai NasDem) dengan dukungan kursi DPRD sebesar 52 kursi;

- 3) Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahudin Uno, MBA. (Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera) dengan dukungan kursi DPRD sebesar 26 kursi.

Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan secara serentak dengan Pilkada di daerah lain yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Adapun berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 telah ditetapkan terkait dengan jumlah perolehan suara masing-masing kandidat yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Hasil Rekapitulasi Suara**  
**Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017**  
**Putaran Pertama**

<b>Kab/Kota</b>	<b>Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A, M.A. &amp; Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si</b>	<b>Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. &amp; Drs. Djarot Syaiful Hidayat, MS.</b>	<b>Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. &amp; Sandiaga Salahudin Uno, MBA</b>	<b>Jumlah Suara Sah Calon</b>
Jakarta Pusat	101.744	244.727	222.814	<b>569.285</b>
Jakarta Utara	142.142	416.720	301.256	<b>860.118</b>
Kep. Seribu	3.891	5.532	4.851	<b>14.274</b>
Jakarta Timur	309.708	618.880	665.902	<b>1.594.490</b>
Jakarta Selatan	177.363	465.524	557.767	<b>1.200.654</b>
Jakarta Barat	203.107	613.194	444.743	<b>1.261.044</b>

<b>Jumlah Akhir</b>	<b>937.955</b>	<b>2.364.577</b>	<b>2.197.333</b>	<b>5.499.865</b>
<b>Presentase</b>	<b>17,06 %</b>	<b>42,99 %</b>	<b>39,95 %</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : <https://kpujakarta.go.id/>*

Apabila melihat hasil dari rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hasil pemilihan tersebut tidak ada satu pasangan calon yang berhasil memiliki suara lebih dari 50%. Oleh karena itu, apabila mengacu kepada UU Nomor 29 Tahun 2007, dengan memperhatikan bahwa warga Jakarta yang multikultural sehingga gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai kepala Pemerintahan Provinsi DKI perlu untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Maka dari itu, UU 29 Tahun 2007 menetapkan di dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memperoleh dukungan suara pemilih lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah perolehan suara yang sah untuk pada akhirnya dapat ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, maka Pilkada DKI Jakarta 2017 dilaksanakan dua putaran dengan pasangan yang berhak untuk maju ke putaran kedua adalah dua pasangan yang memperoleh suara tertinggi. Sehingga pasangan yang berhak maju ke putaran kedua adalah pasangan calon nomor urut 2 (dua) Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. Djarot Syaiful Hidayat, MS. serta pasangan calon nomor urut 3 (tiga) Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahudin Uno, MBA. Jumlah dukungan kursi partai politik pada Pilkada DKI

putaran kedua mengalami perubahan dimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya mendukung paslon Agus-Sylvi memberikan dukungannya kepada paslon Ahok-Djarot sehingga total dukungan pun menjadi 68 kursi, sementara Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan dukungannya kepada Anies-Sandi yang membuat kursi dukungan untuk paslon nomor 3 ini menjadi 28 kursi. Sementara Partai Demokrat memutuskan untuk tidak mendukung kedua pasangan calon yang akan bertarung di putaran kedua atau non-blok (<https://news.detik.com/berita/3448058/demokrat-kami-nonblok-di-pilgub-dki-putaran-kedua> diakses pada 29 Maret 2018, pukul 12.40 WIB.).

Adapun hasil perolehan suara pada Pilkada DKI putaran kedua ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Hasil Rekapitulasi Suara**  
**Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017**  
**Putaran Kedua**

<b>Kab/Kota</b>	<b>Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. &amp; Drs. Djarot Syaiful Hidayat, MS.</b>	<b>Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. &amp; Sandiaga Salahudin Uno, MBA</b>	<b>Jumlah Suara Sah Calon</b>
Jakarta Pusat	243.416	333.033	<b>576.449</b>
Jakarta Utara	418.068	466.340	<b>884.408</b>
Kep. Seribu	5.391	8.796	<b>14.187</b>
Jakarta Timur	612.092	933.173	<b>1.605.266</b>

Jakarta Selatan	459.639	754.665	<b>1.214.304</b>
Jakarta Barat	611.759	684.980	<b>1.296.739</b>
<b>Jumlah Akhir</b>	<b>2.350.366</b>	<b>3.240.987</b>	<b>5.591.353</b>
<b>Presentase</b>	<b>57,96 %</b>	<b>42,04 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : <https://kpujakarta.go.id/>

#### 7.4. Partisipasi Politik Pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Angka partisipasi politik pemilih pada saat pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 baik pada putaran pertama maupun putaran kedua dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.8**  
**Partisipasi Pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017**

No	Kab/Kota	Putaran Pertama			Putaran Kedua		
		Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi
1.	Jakarta Barat	1.689.514	1.271.183	75,2 %	1.693.679	1.307.203	77,2 %
2.	Jakarta Pusat	756.472	578.656	76,5 %	762.636	584.554	76,6 %
3.	Jakarta Selatan	1.607.634	1.214.918	75,6 %	1.613.330	1.232.941	76,4 %
4.	Jakarta Timur	2.038.189	1.616.841	79,3 %	2.003.868	1.627.076	80,0 %
5.	Jakarta Utara	1.108.726	867.192	78,2 %	1.136.271	895.526	78,8 %
6.	Kepulauan Seribu	17.709	14.417	81,4 %	17.865	14.355	80,4 %
<b>TOTAL</b>		<b>7.218.244</b>	<b>5.563.207</b>	<b>77,1 %</b>	<b>7.257.649</b>	<b>5.661.655</b>	<b>78,0 %</b>

Sumber : <https://pilkada2017.kpu.go.id>

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta putaran pertama sebesar 77,1% dengan wilayah yang paling tinggi partisipasinya adalah Kabupaten Kepulauan Seribu dengan angka partisipasi sebesar 81,4% dan terendah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan angka partisipasi sebesar 75,2 %. Sementara pada putaran kedua, angka partisipasi pemilih DKI Jakarta mengalami peningkatan yaitu sebesar 78,0% dengan wilayah yang paling tinggi partisipasinya adalah masih wilayah yang sama dengan putaran pertama yaitu Kepulauan Seribu dengan angka 80,4% dan Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan angka partisipasi yang terendah yaitu 76,4%.

## **8. Lambang Daerah**

Lambang resmi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Lambang Provinsi DKI Jakarta**



*Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang\\_Jakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_Jakarta)*

## Makna Gambar dalam Lambang Provinsi DKI Jakarta

(<http://www.artilambang.com/2014/03/arti-lambang-provinsi-dki-jakarta.html>

diakses pada 3 Maret 2018, Pukul 10.29 WIB) adalah sebagai berikut:

- 1) Pintu Gerbang, memiliki makna sebagai lambang kekhususan Jakarta yang merupakan pintu keluar masuk dari kegiatan-kegiatan nasional dan hubungan internasional;
- 2) Tugu Monumen Nasional, memiliki makna sebagai lambang dari sebuah kemegahan, daya juang dan cipta;
- 3) Padi dan Kapas, memiliki makna sebagai lambang sebuah kemakmuran;
- 4) Ombak Laut, memiliki makna sebagai lambang dari sebuah kota, dan negeri kepulauan;
- 5) Sloka "Jaya Raya", memiliki makna sebagai slogan dari perjuangan Jakarta dan juga sebagai wujud semangat Jakarta agar selalu tetap berjaya dan besar;
- 6) Perisai Segilima, memiliki makna sebagai melambangkan Pancasila.

## Arti Warna dalam Lambang Provinsi DKI Jakarta

- 1) Warna Emas pada pinggir Perisai, memiliki makna sebagai lambang kemuliaan Pancasila;
- 2) Warna Merah pada Sloka, memiliki makna sebagai lambang kepahlawanan;

- 3) Warna Putih pada Pintu Gerbang, memiliki makna sebagai sebuah lambang kesucian;
- 4) Warna Kuning pada Padi, Hijau, Putih dan Kapas, memiliki makna sebagai sebuah kemakmuran dan keadilan;
- 5) Warna Biru, memiliki makna sebagai angkasa yang bebas dan luas;
- 6) Warna Putih, memiliki makna sebagai alam laut yang kasih.

## **B. Partai NasDem**

### **1. Sejarah Partai NasDem**

Berikut adalah sejarah Partai NasDem yang dihimpun dari website resmi Partai NasDem [www.partainasdem.or](http://www.partainasdem.or).

Sebelum menjadi sebuah partai politik, Nasional Demokrat awalnya merupakan sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pendeklarasian Ormas Nasional Demokrat dilakukan oleh 45 tokoh nasional pada 1 Februari 2011 di Istora Senayan dengan Surya Paloh sebagai pencetus utamanya. NasDem hadir dalam rangka melakukan suatu upaya gerakan perubahan yang diberikan nama Gerakan Restorasi. Gerakan Restorasi ini berlandaskan tiga hal yaitu politik solidaritas, ekonomi emansipatif dan partisipatif, dan budaya gotong-royong.

Partai NasDem sendiri dideklarasikan kelahirannya pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai NasDem didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa

dipisahkan lepas dari visi dan misi utama Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Semenjak Partai NasDem di daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Surya Paloh sebagai pendiri partai menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. Kemudian, untuk mengisi posisi ketua umum Surya Paloh menunjuk Rio Capella sebagai ketua umum partai hingga akhirnya pada saat Kongres I, hingga akhirnya kepemimpinan Partai NasDem diserahkan kepada Surya Paloh oleh Rio Capella.

Pada tanggal 25-26 Januari 2013, Partai NasDem melaksanakan Kongres I yang dilaksanakan di Jakarta. Kongres diikuti oleh 66 orang yang merupakan perwakilan dari 33 DPW, 994 orang yang merupakan perwakilan dari 497 DPD, dan 9 orang merupakan perwakilan dari Majelis Tinggi, serta 2 orang dari anggota Dewan Pakar Partai. Selain itu, Kongres I juga dihadiri 800 orang peninjau yang berasal dari seluruh Indonesia. Pelaksanaan kongres tersebut merupakan suatu momentum yang bersejarah bagi Partai NasDem, mengingat berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam Kongres I ini. Salah satunya adalah momen terpilihnya dan diterapkannya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem yang baru yaitu Surya Paloh untuk masa jabatan tahun 2013-2018. Terpilihnya Surya Paloh sebagai ketua umum diambil pada tanggal 25 Januari 2013 pada saat sidang pleno pertama dengan dukungan dari seluruh elemen partai yang berjumlah 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), kemudian 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta empat organisasi sayap partai yaitu Gerakan Massa Buruh, Badan Advokasi Hukum, Liga Mahasiswa, dan Petani NasDem, bersatu untuk memberikan

kepercayaan kepada Surya Paloh untuk memimpin Partai NasDem hingga tahun 2018.

Selain memberikan kepercayaan kepada Surya Paloh untuk memimpin partai 5 (lima) tahun kedepan, Kongres I juga memberikan mandat penuh kepada ketua umum untuk dapat segera menyusun struktur kepengurusan partai dan perangkat-perangkat partai dengan waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah terpilih sebagai ketua umum. Selain itu, kongres juga memberi mandat kepada Dewan Pimpinan Pusat di bawah kepemimpinan ketua umum Surya Paloh untuk dapat menetapkan strategi dan kebijakan-kebijakan partai untuk dapat memenangi Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

Setelah resmi menjadi partai, NasDem terus berupaya memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi partai peserta Pemilu. Partai NasDem dalam ikhtiarnya untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2014, akhirnya bersama dengan 46 parpol lainnya mengajukan berkas administrasi kepartaian kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada verifikasi awal dari total 46 parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2014 di KPU hanya 34 partai politik saja yang lolos, termasuk Partai NasDem di dalamnya.

Setelah melakukan verifikasi lanjutan yaitu berupa verifikasi administrasi terhadap 34 parpol yang lolos verifikasi sebelumnya, pada hari Minggu 28 Oktober 2012 malam KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi yang isinya menyampaikan bahwa ada 16 partai politik termasuk partai-partai politik lokal Aceh yang lolos dan maju ke tahapan selanjutnya yaitu verifikasi faktual dan 18 partai politik lainnya dinyatakan gugur.

Satu-satunya partai politik baru yang berhasil lolos menuju tahap verifikasi administrasi adalah Partai NasDem. Berdasarkan penilaian KPU, dari total 16 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, Partai NasDem merupakan parpol yang berhasil lolos verifikasi administrasi dengan kualifikasi terbaik. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan verifikasi faktual merupakan tahap verifikasi selanjutnya yang dilakukan dengan cara KPU mengecek langsung ke lapangan terkait dengan keberadaan infrastruktur parpol di setiap daerah yang disesuaikan dengan hasil dari verifikasi administrasi.

### **Lolos Verifikasi Faktual**

Senin 7 Januari 2013 KPU secara resmi mengumumkan hasil dari verifikasi faktual. Dalam kesempatan itu KPU menyatakan Partai NasDem merupakan salah satu partai politik yang berhak mengikuti Pemilu dan lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi faktual tingkat pusat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Partai NasDem memenuhi semua syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi, dengan bukti-bukti, antara lain:

- 1) Memenuhi kepengurusan (Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Jenderal);
- 2) Memiliki keterwakilan perempuan lebih dari 30%;
- 3) Mempunyai kantor yang dapat digunakan hingga akhir Pemilu 2014.

Partai NasDem merupakan satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014 dari sekian banyak partai yang mendaftar. Hal ini juga membuat Partai NasDem mengikuti Pemilu sebagai yang pertama kalinya.

### **Nomor Urut 1**

Dalam proses pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014, Partai NasDem mendapatkan nomor urut 1 yang disambut dengan rasa optimis oleh seluruh elemen Partai NasDem dengan satu tekad mewujudkan gerakan perubahan melalui Restorasi Indonesia. (<https://www.partainasdem.id/pages/sejarah-partai-nasdem>, diakses pada 3 Maret 2018, Pukul 10.04 WIB)

### **Nomor Urut 5**

Setelah melewati proses verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 17 Februari 2018 telah mengumumkan 14 partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2019 dari 16 partai politik yang telah mendaftar ke KPU untuk mengikuti Pemilu 2019. Pada hari itu juga KPU langsung menundi nomor urut partai politik peserta Pemilu dan Partai NasDem mendapatkan nomor urut 5 serta Pemilu 2019 ini merupakan kali keduanya Partai NasDem sebagai peserta Pemilu.

## **2. Visi dan Misi Partai NasDem**

Visi dan Misi Partai Nasional Demokrat tercantum di dalam Bab II Pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar partai, adapun bunyi visi dan misi Partai NasDem adalah sebagai berikut:

### **Visi :**

“Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.”

**Misi :**

- 1) Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan;
- 2) Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal;
- 3) Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan

soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

### **3. Tujuan dan Fungsi Partai NasDem**

Tujuan : Partai NasDem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.

Fungsi : Dengan semangat kebangsaan partai berfungsi untuk:

- 1) Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi;
- 3) Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab;
- 4) Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi ekonomi;
- 5) Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.
- 6) Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.
- 7) Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

### **4. Keanggotaan dan Sistem Kaderisasi**

Anggota Partai NasDem terdiri beberapa unsur diantaranya kader partai, anggota biasa, anggota kehormatan, dan simpatisan yaitu mereka yang berjasa

terhadap partai, mendukung tujuan partai akan tetapi belum menjadi anggota.

Adapun kader partai terdiri dari:

- 1) Kader Tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan;
- 2) Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang;
- 3) Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah;
- 4) Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat;
- 5) Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan Partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

## **5. Perangkat dan Struktur Partai**

Perangkat partai terdiri atas Majelis Tinggi NasDem, Mahkamah NasDem, Dewan Pembina Partai, dan Dewan Pimpinan Pusat. Sementara untuk struktur partai terdiri atas Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang berada di tingkat Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang berada di tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berada di tingkat kecamatan, Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) yang berada di tingkat desa, dan Perwakilan Luar Negeri.

## **6. Struktur Kepengurusan**

Struktur Kepengurusan Partai NasDem berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH – 20 .AH. 11.01.

TAHUN 2017:

KETUA UMUM	: SURYA PALOH
Ketua Bid. Pemenangan Pemilu	: A. Effendy Choirie
Ketua Bid. Organisasi, Kaderisasi, & Keanggotaan	: Sri Sajekti Sudjunadi
Ketua Bid. Media dan Komunikasi Publik	: Willy Aditya
Ketua Bid. Pendidikan Politik dan Kebudayaan	: Nining Indra Shaleh
Ketua Bid. Politik dan Pemerintahan	: Viktor Bungtilu Laiskodat
Ketua Bid. Hukum, Advokasi dan HAM	: Taufik Basari
Ketua Bid. Otonomi Daerah	: Hayono Isman
Ketua Bid. Pertanian dan Maritim	: Nurul Almy Hafild
Ketua Bid. Pertahanan dan Keamanan	: Supiadin Aries Saputra
Ketua Bid. Energi, SDA dan Lingkungan Hidup	: Zulfan Lindan
Ketua Bid. Agama dan Masyarakat Adat	: Hasan Aminuddin
Ketua Bid. Hubungan Luar Negeri	: H. P. Martin Yudi
Ketua Bid. Ekonomi	: Rachmat Gobel
Ketua Bid. Kesehatan, Perempuan dan Anak	: Amelia Anggraini
Ketua Bid. Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja	: Irma Suryani
Ketua Bid. Olahraga, Pemuda dan Mahasiswa	: Prananda Surya Paloh

SEKRETARIS JENDRAL	: JOHNNY G. PLATE
Wasekjen Bid. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi	: Hermawi Taslim
Wasekjen Bid. Internal dan Kesekretariatan	: Siar Anggretta .S
Wasekjen Bid. Renlitbang	: Dedy Ramanta
Wasekjen Bid. Eksternal	: Yulisa Baramuli
BENDAHARA UMUM	: AHMAD HI. ALI
Waben Bid. Penggalangan Dana	: Lusyani Suwandi
Waben Bid. Pengelolaan Aset	: Joice Triatman

## **7. Kursi di Parlemen**

Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 yang juga merupakan keikutsertaan yang pertama Partai NasDem di Pemilihan Umum Legislatif, Partai NasDem berhasil memenangkan 35 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari total 560 kursi yang diperebutkan. Dalam arti lain bahwa Partai NasDem berhasil mendapatkan 6,72% total kursi DPR-RI atau dengan dukungan suara mencapai 8.402.812 suara dari total 124.972.491 suara sah. Hal tersebut membuat Partai NasDem berada pada urutan ke-8 dari 10 partai politik yang berhasil lolos ke parlemen.

## 8. Lambang Partai

Lambang resmi dari Partai NasDem adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Lambang Partai NasDem**



*Sumber : <https://www.partainasdem.id/>*

Adapun makna dari lambang Partai NasDem tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkaran Biru bermakna kemerdekaan berpikir, gagasan-gagasan baru, kecepatan mengambil keputusan, ketepatan bertindak, keberanian, kewaspadaan, kepercayaan diri dan keteguhan hati dalam berjuang;
- 2) Dua siluet berwarna oranye bermakna gotong royong, harmonisasi antara modernitas dan kearifan lokal, menunjang tinggi kesetaraan sosial, mengusung percepatan ekonomi dan keadilan distribusi pada saat yang sama;
- 3) Warna oranye melambangkan kemakmuran, seperti warna padi yang siap dipanen, melambangkan gagasan yang selalu segar dan siap diimplementasikan.

## **9. Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem DKI Jakarta**

Berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi suara dari KPUD DKI Jakarta, Partai NasDem berhasil mendapatkan 206.117 suara dari total suara sah sebanyak 4.537.227 atau dalam hal ini, Partai NasDem berhasil meraup 4,72% kursi DPRD. Dari hasil tersebut, Partai NasDem mendapatkan 5 kursi dari total keseluruhan kursi anggota DPRD DKI Jakarta untuk Periode 2014-2019 sebanyak 106 kursi yang terdiri dari 10 partai politik di DPRD DKI Jakarta. (<https://news.detik.com/berita/2581416/ini-perolehan-kursi-partai-politik-di-dprd-dki>, diakses pada 2 Februari 2018 pukul 16.25 WIB)

Adapun kepengurusan Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penasehat : Drs. Inggard Joshua
- 2) Ketua Fraksi : Bestari Barus, S.H
- 3) Sekretaris Fraksi : H. Hasan Basri Umar, S.H, M.Si
- 4) Bendahara Fraksi : Ir. James Arifn Sianipar, M.M
- 5) Anggota : Capt. H. Subandi

Sementara struktur kepengurusan Partai NasDem DPW DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 543 – SK/DPP-NasDem/X/2017 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta:

## **I. DEWAN PERTIMBANGAN WILAYAH**

Ketua : Jefri Darmadi  
Anggota : Drs. Tb. Orri Buchori, M.M  
Anggota : Komarudin, S.H  
Anggota : Mayjen TNI (Purn) Winston P. Simanjuntak, S.IP., M.Si  
Anggota : Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Raphy Uli Tobing

## **II. DEWAN PAKAR WILAYAH**

Ketua : Drs. M. Hariadi Anwar  
Anggota : Paskalis A. da Cunha, S.H.  
Anggota : Michael Dotulong  
Anggota : Yohanes Mean Duli, MBA., PMP.  
Anggota : Juhanny Fatmarida  
Anggota : Meina Fatriani Paloh

## **III. DEWAN PIMPINAN WILAYAH**

Ketua : Wanda Hamidah, SH  
Wk. Bid. Pemilihan Umum : Capt. Subandi  
Wk. Bid. Organisasi, Kenggotaan & Kaderisasi : Ir. H. Arie Putra .B  
Wk. Bid. Media & Komunikasi Publik : Honey Annisa  
Wk. Bid. Politik & Pemerintahan : Farahdina A. M.Si.  
Wk. Bid. Hukum, Advokasi, & HAM : Parulin Siregar, M.H

Wk. Bid. Pertanian & Maritim	: Mualimin .D, SE.
Wk. Bid. Pengabdian & Pemberdayaan Masy.	: James Arifin .S
Wk. Bid Energi, SDA & Lingkungan Hidup	: Slamet
Wk. Bid. Agama & Masyarakat Adat	: Taufik Damas
Wk. Bid. Hubungan Antar Daerah	: Ir. Bajora Alamsyah
Wk. Bid. Ekonomi	: Dr. Yuyun Pirngadi
Wk. Bid. Kesehatan, Perempuan, & Anak	: Luh Putu Irawati .U
Wk. Bid. Industri, Perdagangan, & Tenaga Kerja	: Ari S. Subrata, SE
Wk. Bid. Olahraga, Pemuda, & Mahasiswa	: N.H. Paloh, SE, MM
Sekretaris	: Wibi Andrino, S.H
Wk. Sekretaris Bid. Organisasi, Keanggotaan & Kaderisaaai	: Anwar Sjani, S.T
Wk. Sekretaris Bid. Internal & Kesekretariatan	: Silvia Devi .S
Wk, Sekretaris Bid. Eksternal	: Khadijah Azhari
Wk. Sekretaris Bid. Renlitbang	: Tania Febriani
Bendahara	: Olivia Vernanda .P
Wk. Bendahara Bid. Penggalangan Dana	: Rendy Rizky Y.S.
Wk. Bendahara Bid. Pengolahan Aset	: Wang Mariyono